

## **ANALISIS PENGARUH BELANJA PEMBANGUNAN/MODAL DAN TINGKAT INFLASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENERIMAAN PAJAK DI INDONESIA**

**Nurhidayati Islamiah**

STIE Tri Dharma Nusantara Makassar

Email : jieiezislamiah@yahoo.co.id

### **ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk : (1) menguji dan menganalisis pengaruh belanja pembangunan/modal terhadap pertumbuhan ekonomi, (2) menguji dan menganalisis pengaruh tingkat inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi, dan (3) menguji dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data dari berbagai sumber literatur, dokumentasi atau informasi dari pihak terkait yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data ini dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan program SPSS 21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) belanja pembangunan/modal berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, (2) secara parsial dalam hasil penelitian ini menemukan tingkat inflasi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, (3) dalam hasil analisis uji parsial pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif tidak signifikan mempengaruhi penerimaan pajak. Hal ini berarti dalam hal belanja pembangunan/modal, pemerintah perlu melakukan belanja yang memiliki *multiplier effect* pada pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi harus menjadi perhatian penting dari pemerintah agar kebijakan-kebijakan yang dibuat bisa menjadikan keuangan negara dalam keadaan yang stabil. Kenaikan pertumbuhan ekonomi mempunyai dampak positif terhadap penerimaan pajak harus menjadi perhatian penting dalam hal pembangunan ekonomi negara.

**Kata Kunci** : Belanja Pembangunan/Modal, Tingkat Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Penerimaan Pajak

## **ANALYSIS OF THE INFLUENCES OF TAX REVENUE, CAPITAL AND DEVELOPMENT EXPENDITURE AND INFLATION RATE TOWARD ECONOMIC GROWTH IN INDONESIA**

**Nurhidayati Islamiah**

STIE Tri Dharma Nusantara Makassar

Email : jieiezislamiah@yahoo.co.id

### **ABSTRACT**

The research aims to : (1) examine and analyze the influences of capital and development expenditure toward economic growth, (2) examine and analyze the influences of inflation rate toward economic growth, and (3) examine and analyze the influences of economic growth toward tax revenue. The research uses secondary data, where the data took from various literary sources, documentation, or information from related parties related to problems in this research. The data analyzed using multiple linear regression with SPSS 21 program. The research showed that : (1) capital and development expenditure partially found negative and significant effects toward economic growth, (2) the partial examine analysis results showed that the policy of inflation rate has a negative effect partially toward economic growth, (3) economic growth has a positive and not significant influences toward tax revenue. This means that

capital and development expenditure, the government need to expend things those has multiplier effect toward economic growth, and inflation rate must be a major attention from the government in order to the policies made can make financial of the countries being stable. Economic growth must be a major attention toward tax revenue for economic development.

**Key Words :** Capital and Development Expenditure, Inflation, Economic Growth and Tax Revenue

## PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh suatu bangsa merupakan proses yang terencana dan berkesinambungan guna mencapai tujuan pembangunan dalam segala bidang. Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999 menyebutkan bahwa pembangunan ekonomi mempunyai arti pengelolaan kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi serta melalui perubahan kemampuan berorganisasi. Kemampuan ekonomi potensial yang dimaksud adalah meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta modal (Jumami, 2004). Keberhasilan kemampuan ekonomi potensial akan dapat mempertinggi kemampuan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan di bidang lainnya. Salah satu tujuan pembangunan jangka panjang bidang pertumbuhan ekonomi adalah terciptanya stabilitas ekonomi di bidang pertanian dan industri. Diharapkan adanya pemerataan pembangunan di seluruh tanah air. Sebagai negara yang berkembang yang menuju era tinggal landas diharapkan Indonesia memiliki landasan yang kuat (Sukirno, 1997).

Berdasarkan amanat konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah meningkatkan kesejahteraan umum yang dimanifestasikan dalam bentuk peningkatan pertumbuhan ekonomi. Menurut Yuliati (2001 : 16), dalam usaha mempercepat pertumbuhan ekonomi dibutuhkan modal untuk digunakan pada kegiatan-kegiatan yang menyentuh langsung aspek kehidupan masyarakat sebagai usaha pemerintah menggerakkan sektor perekonomian. Pendapat tersebut didukung Malthus, yaitu untuk adanya perkembangan ekonomi diperlukan adanya kenaikan jumlah kapital untuk investasi yang terus-menerus di sektor produktif (Irawan dan Suparmoko, 2002 : 27). Investasi di sektor produktif adalah semua jenis investasi atau penanaman modal yang menambah sumberdaya-sumberdaya baru yang nantinya akan meningkatkan stok modal suatu negara sehingga pada gilirannya nanti akan meningkatkan tingkat *output* dan pendapatan nasional (Arsyad, 2004 : 214-215).

Pada umumnya pembangunan dinegara-negara berkembang difokuskan pada pembangunan ekonomi dalam rangka upaya pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan peningkatan produksi barang dan jasa, yang antara lain diukur dengan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) pada tingkatan nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk daerah Tingkat I maupun Tingkat II. Pertumbuhan ekonomi dikaitkan sebagai peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi. Salah satu komponen yang mempengaruhi kenaikan output tersebut adalah pengeluaran pemerintah dalam hal belanja pembangunan/modal.

Dalam rangka mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang kondusif salah satu komponen yang diandalkan adalah belanja modal. Keberadaan Anggaran Belanja Modal yang bersumber dari penerimaan Pajak apabila dibandingkan dengan investasi swasta nilainya relatif kecil meskipun demikian dana tersebut mempunyai peranan strategis, karena sasaran penggunaannya untuk membiayai pembangunan

dibidang sarana dan prasarana yang dapat menunjang kelancaran usaha swasta dan pemenuhan pelayanan masyarakat.

Penanaman Modal dan Penerimaan Pajak selama ini merupakan sumber pendapatan negara yang dominan, oleh karena itu perlu ditingkatkan penerimaannya. Berdasarkan alur pikir teori keuangan daerah, penerimaan pajak umumnya digunakan untuk membiayai jasa pelayanan yang bersifat semi publik (*semi public goods*) dimana komponen manfaat individunya relatif lebih besar. Komponen utama dalam pendapatan fiskal adalah sektor perpajakan. Diberbagai negara didunia ini sektor perpajakan mampu menyumbang lebih dari 50 % pendapatan fiskal. Hal ini menjadikan sektor pajak merupakan sektor penting dan signifikan yang harus dikelola secara optimal (Camelia : 2005).

Pentingnya peran pemerintah dalam penerimaan pajak, anggaran belanja pemerintah dan menjaga tingkat inflasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat lebih lanjut pengaruh dari penerimaan pajak, anggaran belanja pemerintah, dan tingkat inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi maka, perlu dilakukan penelitian berjudul “Analisis Pengaruh Belanja Pembangunan/Modal dan Tingkat Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penerimaan pajak di Indonesia”.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas yaitu :

1. Apakah belanja pembangunan/modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama 30 tahun terakhir mulai dari tahun 1984 sampai dengan 2013?
2. Apakah tingkat inflasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama 30 tahun terakhir mulai dari tahun 1984 sampai dengan 2013?
3. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Indonesia selama 30 tahun terakhir mulai dari tahun 1984 sampai dengan 2013?

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **Konsep Pertumbuhan Ekonomi (*Economic Growth*)**

Pertumbuhan ekonomi (*Economic Growth*) adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat penambahan faktor-faktor produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh penambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya. Pertambahan potensi memproduksi seringkali lebih besar dari pertambahan produksi yang sebenarnya. Dengan demikian perkembangan ekonomi adalah lebih lambat dari potensinya (Sadono Sukirno, 1994 : 10).

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Berkelanjutan pertumbuhan ekonomi harus mengarah standar hidup yang lebih tinggi nyata dan kerja meningkat.

Simon Kuznet mendefinisikan pertumbuhan ekonomi suatu negara sebagai kemampuan negara itu untuk menyediakan barang-barang ekonomi yang terus meningkat bagi penduduknya, pertumbuhan kemampuan ini berdasarkan pada kemajuan teknologi dan kelembagaan serta penyesuaian ideologi yang dibutuhkannya.

### **Konsep Penerimaan Pajak**

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Pajak menurut Pasal 1 Angka 1 UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan memperhatikan unsur penting dari pengertian pajak tersebut, nampaklah bahwa pada prinsipnya kesemua arti atau pengertian dari pajak itu mempunyai inti dan tujuan yang sama.

### **Belanja Modal**

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila :

- a. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat dan kapasitas.
- b. Pengeluaran tersebut melebihi minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- c. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.
- d. Pengeluaran tersebut dilakukan sesudah perolehan aset tetap atau aset lainnya dengan syarat pengeluaran mengakibatkan masa, manfaat, kapasitas, kualitas dan volume aset yang dimiliki bertambah serta pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap/aset lainnya.

Ada lima kategori utama belanja modal yaitu :

1. Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah, serta lain-lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah tersebut siap pakai.
2. Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran yang diperlukan untuk pengadaan alat-alat dan mesin-mesin yang dipergunakan dalam kegiatan pembentukan modal termasuk biaya untuk penambahan, penggantian dan peningkatan kualitas peralatan dan mesin, serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari dua belas bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran yang digunakan untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembentukan modal untuk pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai termasuk di dalamnya pengadaan berbagai barang kebutuhan pembangunan gedung dan bangunan.
4. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan serta perawatan prasarana dan sarana termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dalam kondisi siap pakai.
5. Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, misalnya belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah.

### **Inflasi**

Dalam ilmu ekonomi, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (*continue*) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-memengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga. Ada banyak cara untuk mengukur tingkat inflasi, dua yang paling sering digunakan adalah CPI dan GDP Deflator.

Inflasi dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu tarikan permintaan (kelebihan likuiditas/uang/alat tukar) dan yang kedua adalah desakan (tekanan) produksi dan/atau distribusi (kurangnya produksi (*product or service*) dan/atau juga termasuk kurangnya distribusi). Untuk sebab pertama lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan moneter (Bank Sentral), sedangkan untuk sebab kedua lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan eksekutor yang dalam hal ini dipegang oleh Pemerintah (*Government*) seperti fiskal (perpajakan/pungutan/insentif/disinsentif), kebijakan pembangunan infrastruktur, regulasi, dll.

Inflasi tarikan permintaan (*demand pull inflation*) terjadi akibat adanya permintaan total yang berlebihan dimana biasanya dipicu oleh membanjirnya likuiditas di pasar sehingga terjadi permintaan yang tinggi dan memicu perubahan pada tingkat harga. Bertambahnya volume alat tukar atau likuiditas yang terkait dengan permintaan terhadap barang dan jasa mengakibatkan bertambahnya permintaan terhadap faktor-faktor produksi tersebut. Meningkatnya permintaan terhadap faktor produksi itu kemudian menyebabkan harga faktor produksi meningkat. Jadi, inflasi ini terjadi karena suatu kenaikan dalam permintaan total sewaktu perekonomian yang bersangkutan dalam situasi *full employment* dimana biasanya lebih disebabkan oleh rangsangan volume likuiditas dipasar yang berlebihan. Membanjirnya likuiditas di pasar juga disebabkan

oleh banyak faktor selain yang utama tentunya kemampuan bank sentral dalam mengatur peredaran jumlah uang, kebijakan suku bunga bank sentral, sampai dengan aksi spekulasi yang terjadi di sektor industri keuangan.

Inflasi desakan biaya (*cost push inflation*) terjadi akibat adanya kelangkaan produksi dan/atau juga termasuk adanya kelangkaan distribusi, walau permintaan secara umum tidak ada perubahan yang meningkat secara signifikan. Adanya ketidaklancaran aliran distribusi ini atau berkurangnya produksi yang tersedia dari rata-rata permintaan normal dapat memicu kenaikan harga sesuai dengan berlakunya hukum permintaan-penawaran, atau juga karena terbentuknya posisi nilai keekonomian yang baru terhadap produk tersebut akibat pola atau skala distribusi yang baru. Berkurangnya produksi sendiri bisa terjadi akibat berbagai hal seperti adanya masalah teknis di sumber produksi (pabrik, perkebunan), bencana alam, cuaca, atau kelangkaan bahan baku untuk menghasilkan produksi tersebut, aksi spekulasi (penimbunan), sehingga memicu kelangkaan produksi yang terkait tersebut di pasaran. Begitu juga hal yang sama dapat terjadi pada distribusi, dimana dalam hal ini faktor infrastruktur memainkan peranan yang sangat penting.

## **METODE PENELITIAN**

### **Pendekatan Penelitian**

Penelitian dilakukan untuk mengetahui analisis pengaruh belanja pembangunan/modal dan tingkat inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak di Indonesia pada tahun 1984 sampai dengan 2013. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji regresi. Analisis ini dipergunakan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran mengenai analisis pengaruh penerimaan pajak, belanja pembangunan/modal dan tingkat inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan bantuan program SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*).

### **Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, khususnya pada Kementerian Keuangan di Kota Makassar, Badan Pusat Statistik Makassar dan juga pada instansi pemerintahan kota Makassar. Adapun waktu penelitian ini di mulai dari bulan September sampai dengan November 2014.

### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data kualitatif adalah data yang diperoleh dari pihak pemerintah dalam bentuk dokumen dan arsip pemerintah yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka. Termasuk dalam klasifikasi data kuantitatif adalah data yang berskala ukur interval dan rasio.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data dari berbagai sumber literatur, dokumentasi atau informasi dari pihak terkait yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non perilaku. Observasi non perilaku adalah metode pengumpulan data dimana peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. Dengan metode ini semua data diperoleh melalui pengumpulan data dengan cara mengamati, mencatat serta mempelajari uraian-uraian dari buku-buku, karya ilmiah berupa jurnal, tesis dan dokumen-dokumen pendukung lainnya.

### **Metode Analisis Data**

Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen, dengan tujuan untuk

mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel yang diketahui (Gujarati, 2007).

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan alat bantu analisis statistik yaitu :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

Y : Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

X1 : Belanja Pembangunan/Modal

X2 : Inflasi

a : Konstanta

b : Angka arah atau koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan atau penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen.

e : Error

### **Definisi Operasional dan Pengukurannya**

Variabel operasional adalah sebuah konsep yang mempunyai variasi nilai yang ditetapkan dalam suatu penelitian. Variabel operasional yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan *output* dari waktu ke waktu yang menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara. Pertumbuhan ekonomi juga dimaknai dengan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.

2. Penerimaan Pajak

Penerimaan Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang atau badan kepada pemerintah pusat tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan negara.

3. Belanja Pembangunan/Modal

Belanja pembangunan diartikan sebagai pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan menambah aset atau kekayaan bagi daerah yang dimana sama halnya dengan investasi yaitu belanja modal yang dilakukan pemerintah yang menghasilkan aktiva tetap tertentu.

4. Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (*continue*) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pertumbuhan Ekonomi**

Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia (GDP), yaitu persentase perubahan PDB Indonesia yang merefleksikan kinerja ekonomi dari tahun ke tahun. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik di Makassar. Tabel data sebagai berikut :

Tabel 1.  
 Persentase Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 1984-2013

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (Persentase)	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (Persentase)	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (Persentase)
1984	6.98	1994	7.54	2004	5.03
1985	2.46	1995	7.97	2005	5.69
1986	5.87	1996	4.54	2006	5.5
1987	4.93	1997	-13.1	2007	6.34
1988	5.78	1998	0.84	2008	6.01
1989	7.46	1999	4.77	2009	4.57
1990	7.24	2000	2.62	2010	6.24
1991	6.95	2001	2.95	2011	6.51
1992	6.46	2002	4.49	2012	6.22
1993	6.5	2003	4.78	2013	5.81
Mean 6.03					

Sumber : Data BPS 2014

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan perekonomian mengalami penurunan persentasi terendah -13.1 % pada tahun 1997 dan kenaikan persentasi pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 1995 sebesar 7.97 %. Nilai rata-rata atau *mean* pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebesar 6.03 %, menunjukkan bahwa penurunan pertumbuhan ekonomi terhadap krisis moneter yang terjadi di akhir tahun 2000an berdampak sistematis bagi perekonomian Indonesia, banyaknya utang dalam valas, proyek jangka panjang yang dibiayai dengan utang jangka pendek, proyek berpenghasilan rupiah dibiayai valas, pengambilan kredit perbankan yang jauh melebihi nilai proyeknya, APBN defisit yang tidak efisien dan efektif, devisa hasil ekspor yang disimpan di luar negeri, perbankan yang kurang sehat, jumlah orang miskin dan pengangguran yang relatif masih besar menjadikan perekonomian Indonesia pada saat itu memburuk ditandai dengan rupiah merosot sangat drastis dari level semula Rp. 2.300 per dollar AS (pertengahan 1997) menjadi level terburuk Rp. 17.000 per dollar AS (Januari 1998).

### PEMBAHASAN

Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, diperoleh bahwa pertumbuhan ekonomi yang dilihat menggunakan indikator belanja pembangunan/modal dan tingkat inflasi yaitu belanja pembangunan/modal negatif signifikan berpengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi berpengaruh negatif signifikan. Sedangkan pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak berpengaruh negatif tidak signifikan. Hasil penelitian terhadap masing-masing variabel dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **Pengaruh Belanja Pembangunan/Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Belanja pembangunan/modal secara parsial dalam hasil penelitian ini menemukan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, ini mengindikasikan semakin tinggi belanja pembangunan/modal ataupun pengeluaran pemerintah tidak akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, hal ini disebabkan oleh belanja modal pemerintah sangat dibatasi oleh sumber penerimaan yang lebih banyak berasal dari pemerintah pusat.

Ditambah lagi, sumber penerimaan tersebut lebih banyak tersedot untuk belanja rutin sehingga alokasi anggaran untuk belanja modal pemerintah menjadi terbatas. Dengan belanja modal pemerintah yang tersedia, seharusnya dialokasikan secara tepat kepada proyek investasi yang mempunyai dampak multiplier yang besar terhadap

pertumbuhan ekonomi. Belanja modal lebih diarahkan kepada pembangunan infrastruktur yang menopang pertumbuhan ekonomi seperti pembangunan jalan ke daerah-daerah produksi.

Demi mencapai pertumbuhan ekonomi nasional yang tercermin melalui pertumbuhan Pendapatan Domestik Bruto, pemerintah perlu melakukan belanja-belanja yang memiliki *multiplier effect* pada pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Belanja yang dimaksud adalah belanja modal (infrastruktur). Penerimaan negara memiliki arti penting dalam menciptakan perluasan kapasitas fiskal pemerintah yang pada akhirnya dapat memperluas pembangunan infrastruktur melalui belanja-belanja yang bersifat *discretionary (discretionary expenditure)*. Oleh karena itu, penerimaan negara di sini yang termasuk di antaranya penerimaan perpajakan, penting untuk dijaga agar secara konsisten menunjukkan prospek yang positif setiap tahunnya demi mencapai pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Dalam hal ini pemerintah perlu menggenjot penerimaan negara, terutama pendapatan dalam negeri berupa penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak melalui berbagai instrumen kebijakan fiskal.

### **Pengaruh Tingkat Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Dalam hasil analisis uji parsial, masuknya kebijakan tingkat inflasi berpengaruh negatif signifikan secara parsial mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hal ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Ndari dan Diah (2012) yang menyatakan inflasi berdampak negatif terhadap pengeluaran pemerintah/belanja pembangunan. Salah satu penjelasan dari turunnya inflasi akibat adanya *shock* pengeluaran pemerintah kemungkinan dapat dijelaskan oleh dampak multiplier dari pengeluaran investasi pemerintah (diantaranya infrastruktur) yang lebih besar dibandingkan pengeluaran rutin. Pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur diperkirakan dapat memperbaiki distribusi barang dan jasa sehingga berkontribusi terhadap penurunan inflasi.

Peningkatan harga secara agregat dalam jangka pendek dapat mengurangi konsumsi masyarakat. Dalam jangka pendek tingkat inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara teori, tingkat inflasi akan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Apabila terjadi peningkatan yang signifikan dari inflasi maka akan menyebabkan krisis ekonomi. Krisis tersebut apabila kemudian dihadapkan dengan pendapatan masyarakat dalam rupiah yang tetap, berimbas pada kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Utang luar negeri dalam rupiah melonjak karena adanya kemerosotan nilai tukar rupiah, harga BBM/tarif listrik naik, tarif angkutan naik, perusahaan tutup atau mengurangi produksinya karena tidak bisa menjual barangnya dan beban utang yang tinggi, dan Pemberhentian Hak Kerja (PHK) terjadi di mana-mana, dan pemerintah sulit untuk menutup APBN.

### **Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak**

Penerimaan pajak dalam teori berhubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi penerimaan pajak maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi. Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak yang lebih besar memungkinkan pemerintah memperoleh penerimaan yang lebih besar pula. Inilah yang dimaksudkan dengan analisis dialektika penerimaan-pengeluaran pemerintah. (Peacock dan Wiseman dalam Sadono Sukirno, 2011). Menurut Peacock-Wiseman, perkembangan ekonomi menyebabkan pungutan pajak meningkat yang meskipun tarif pajaknya mungkin tidak berubah, pada gilirannya mengakibatkan pengeluaran pemerintah meningkat pula. Dalam penelitian ini menemukan penerimaan pajak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi masih dipengaruhi oleh penerimaan pajak yang merupakan sumber anggaran pendapatan negara yang paling pokok.

Pajak memiliki dampak dua arah pada pertumbuhan ekonomi suatu negara layaknya pedang bermata dua. Di sisi lain penerimaan pajak yang tinggi dapat memacu sebuah negara untuk meningkatkan belanja-belanja pemerintah yang dapat memacu perekonomian hingga berujung pada terciptanya kenaikan tingkat pertumbuhan ekonomi. Namun, di sisi lain, tarif pajak yang ditetapkan terlalu tinggi oleh pemerintah akan berdampak langsung pada menurunnya konsumsi masyarakat.

Demikian pula sebaliknya, dampak langsung dari pungutan pajak adalah pada pendapatan disposibel masyarakat. Pendapatan disposibel merupakan sejumlah pendapatan yang dapat dibelanjakan untuk konsumsi masyarakat. Ketika tarif pajak dinaikkan, maka pendapatan disposibel akan menjadi turun, sebab masyarakat perlu membayar pajak lebih tinggi dari yang seharusnya. Dengan menurunnya pendapatan disposibel ini, otomatis konsumsi masyarakat pun akan menjadi turun pula. Turunnya konsumsi agregat masyarakat akan berdampak pada turunnya pendapatan nasional ekuilibrium. Demikian pula, jika pungutan pajak diturunkan, maka konsumsi relatif akan naik.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

1. Belanja pembangunan/modal berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Koefisien belanja pembangunan/modal pemerintah bernilai negatif menunjukkan bahwa apabila pengeluaran pemerintah meningkat maka akan menurunkan atau menghambat pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan pengeluaran rutin pemerintah lebih bersifat konsumtif dan tidak produktif serta sebagian besar tidak bersifat kontraktif.
2. Tingkat inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Apabila terjadi peningkatan yang signifikan dari inflasi maka akan menyebabkan krisis ekonomi yang akan berdampak pada penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi.
3. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penerimaan pajak. Pertumbuhan ekonomi menyebabkan pungutan pajak meningkat yang meskipun tarif pajaknya mungkin tidak berubah.

### **Saran**

1. Berdasarkan simpulan peneliti maka pengaruh variabel belanja pembangunan /modal negatif signifikan dengan kajian teori dan penelitian terdahulu perlu mendapat perhatian baik bagi pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Belanja modal pemerintah yang tersedia, seharusnya dialokasikan secara tepat kepada proyek investasi yang mempunyai dampak multiplier yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja modal lebih diarahkan kepada pembangunan infrastruktur yang menopang pertumbuhan ekonomi seperti pembangunan jalan ke daerah-daerah produksi dan hal yang penting adalah pengawasan langsung dari pemerintah pada proyek-proyek pembangunan agar sesuai dengan dana yang dialokasikan pada belanja pembangunan modal untuk pertumbuhan ekonomi yang merata.
2. Inflasi juga perlu mendapat perhatian dari pemerintah serta instansi terkait seperti bank Indonesia agar stabilisasi keuangan negara terjaga dengan baik.
3. Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif tidak signifikan dengan kajian teori dan peneliti terdahulu terhadap penerimaan pajak. Saran yang diberikan yaitu sebaiknya penerimaan pajak diawasi dan dimaksimalkan pemungutannya pada sektor penerimaan pajak tidak langsung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arsintadiani, D dan Harsono, M. (2002). *Pengaruh Tingkat LMX terhadap Penilaian Kinerja dan Kepuasan Kerja dengan Kesamaan Gender dan Locus Of Control Sebagai Variabel Moderator*. Jurnal Perspektif, Volume 7, Nomor 2, Desember 2002 : 113-122.
- Arsyad, Lincoln. 2004. *Ekonomi Pembangunan*, Edisi ke-4, Cetakan ke-2, Penerbit STIE YKPN, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. *APBN*, 2014. Makassar.
- Badruddin, Rudy. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*, Edisi 1, Cet. 1, Penerbit UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Bati. 2009. *Belanja Modal Berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara*, Sumatera Utara.
- Brotodiharjo, R Satoso. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Edisi ke-3, P.T. Rafika Aditama, Bandung, 1998.
- Camelia. (2002). *Pengaruh Penerimaan Negara dan Pajak dalam Negeri terhadap Pertumbuhan Ekonomi*. Penelitian Tesis.
- Darwanto dan Yulia. (2007). *Pengaruh Signifikan Antara Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal Dalam APBD*. 2007. Bali.
- Djarwanto. 2001. *Mengenal Beberapa Uji Statistik dalam Penelitian*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Ghozali, Imam. 2006. *Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi ke 4. Badan Penerbit Universitas Diponegoro : Semarang.
- Gujarati, Damodar. N. (2007). *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Edisi Ketiga. Jakarta : Erlangga.
- Halim, Abdul dan Subianto, Ibnu. 2008. *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah : Analisis Investasi (Belanja Modal) Sektor Publik Pemerintah Daerah*. Edisi Pertama, Penerbit UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi 3, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Hamzah, Ardi. 2007. *Pengaruh Belanja dan Pendapatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran (Studi pada APBN 1999-2006)*. Konferensi Penelitian Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik Pertama : Membangun Pondasi Komunikasi dalam Mewujudkan Akuntabilitas Publik, Pascasarjana Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jatim. Surabaya, 25-26 April 2007, Hal 1-18.
- <http://evaoktaviagunawan.wordpress.com/2011/12/18/definisi-pajak-menurut-beberapa-ahli-ekonomi/>
- <http://id.wikipedia.org/wiki/pajak/2014/09/23>
- Ilyas Irawan, B. Wirawan dan Suhartono, Rudi. 2007. *Panduan Komprehensif Praktis Pajak Penghasilan : Sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2000*, Penerbit Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia, Jakarta.
- Irawan dan Soeparmoko. 2002. *Ekonomika Pembangunan*, Edisi 6, Cetakan 1, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Irvan Saepul. 2012. *Pengaruh Inflasi dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Pengeluaran Pemerintah 2012*, Unikom.
- Jogiyanto, H. M. 2010. *Metodologi Penelitian Bisnis : Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Edisi Pertama. Yogyakarta : BPFE.
- Jumami, Nanik. 2004. *Analisis Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur*, UPN Veteran Jatim, Surabaya. Unpublished.

- Kamaluddin, Rustian. 1996. *Pengantar Ekonomi Pembangunan : Dilengkapi dengan Analisis Beberapa Aspek Pembangunan Ekonomi Nasional*, Penerbit LPFE UI, Jakarta.
- Kneller, dkk. 1999. <http://2frameit.blogspot.com/2011/12/tentang-hubungan-antara-pajak.html>.
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Mangkoesebroto, Guritno. 1993. *Ekonomi Publik*, Edisi ke-3, Cetakan ke-1, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Miller dan Russex. 1997. <http://2frameit.blogspot.com/2011/12/tentang-hubungan-antara-pajak.html>.
- Nurmantu, Safri. *Pengantar Perpajakan*. Ed. Ke-3. Jakarta : Granit, 2005.
- Pascual, M and Alvares-Garcia, S. *Government Spending and Economic Growth in The European Countries : An Empirical Approach.* < <http://papers.ssrn.com>>.
- Prama, Adrian. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi Swasta dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia 2013*. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Priyo Hari, Adi. 2006. *Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali)*. Simposium Nasional Akuntansi (SNA) IX, Padang, 23-26 Agustus 2006, Hal. 1-21.
- Ram, R. *Government Size and Economic Growth : A New Framework and Some Evidence from Cross-Section and Time-Series Data*. American Economic Review 76 (1986). 191-203.
- Ramayandi, Arief. 2003. *Economic Growth and Government Size In Indonesia : Some Lessons for The Local Authorities*. Working Paper in Economics and Development Studies No. 200302, Padjadjaran University.
- Republik Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. 1983. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pajak.
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Rismawati, Wenni. 2013. *Pajak dan Variabel Makro Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus : 2001-2012)*.
- Ritonga. 2011. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara*. Universitas Sumatera Utara, 2011.
- Soemitro, Rochmat, *Pajak Daerah*. Terjemahan Geodhart, Jakarta, 1982.
- Sulaiman, Wahid. 2004. *Analisis Regresi Menggunakan SPSS Contoh Kasus dan Pemecahannya*, Yogyakarta : Penerbit ANDI.
- Suparmoko. 1987. *Pengeluaran Pemerintah*. Erlangga.
- Surjaningsih, Ndari. Diah, uteri. *Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Output dan Inflasi*. Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan, 2012.
- Waluyo, J. 2007. *Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah di Indonesia*. Disampaikan dalam Seminar Paralel Session 1 A : Wisma Makara UI, Depok.
- [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
- Yulia, Asnafiah. 2001. *Kemandirian dan Pertumbuhan Ekonomi dalam Menyongsong Otonomi Daerah (Studi Kasus Kabupaten Sleman, DIY)*, Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis (KEBI), Vol. 6, Edisi April-Juli 2001, STIE Kerjasama (Stiekers).